

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se - Jawa Periode 2015)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

ANDIKA ELIS SAPUTRA

B200140056

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se - Jawa Periode 2015)**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

ANDIKA ELIS SAPUTRA

B200140 056

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se - Jawa Periode 2015)

Oleh :

ANDIKA ELIS SAPUTRA

B 200 140 056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 07 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :


1. Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Fauzan, S.E, M.Si
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(Dr. Syamsudin, MM)
NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2018

Penulis



ANDIKA ELIS SAPUTRA

B 200 140 056

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se - Jawa Periode 2015)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel *intervening*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern. Sedangkan variabel independennya akuntabilitas laporan keuangan dan variabel *intervening*nya adalah kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di pulau Jawa yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember tahun 2015. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga didapatkan total sampel 108 pemerintah daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolenieritas). Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh secara negative signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, dan kinerja pemerintah daerah mampu mengintervening sistem pengendalian intern dan akuntabilitas laporan keuangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern (SPI), Kinerja Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Laporan Keuangan.

Abstract

This study aims to examine the effect of internal control systems on accountability of financial statements by using the performance of local governments as intervening variable. This research uses the internal control system as dependent variable while the accountability of financial report was used as independent variable and performance of local government was used as intervening variable. The population in this study is the local government on the entire Java island which were published the Audit Report of the Local Government Financial Statements as per December 31, 2015. This study uses purposive sampling as sampling technique method which resulted a total samples of 108 local governments were obtained. the multiple regression analysis classic assumption tests (normality test, heteroscedasticity test, and multicolenierity test) were used previously for testing the data and followed by the Multiple Linear Regression Analysis that was used for data analysis technique. The result shows that the internal control system has a significant negative effect on the performance of local government, while the performance of the local government influences the accountability of the financial statements. Further, the internal

control system has a significant negative effect on the accountability of the financial statements, and it proofed that the performance of local government is able to intervene the interaction between the internal control system and accountability financial statements.

Keywords: *Internal Control System (ICS), Local Government Performance, Accountability of Financial Statement.*

1. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan (*Good Governance*) merupakan isu yang sedang gencar-gencarnya untuk dikampanyekan. Karena di dalamnya mengandung unsur: yang pertama, keterbukaan sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa *stakeholders* memiliki keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak *stakeholders* dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif. Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka. Secara umum, ketiga prinsip *good governance* tersebut di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi efektifitas sistem pengendalian intern. Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 mengungkapkan 4 opini Tidak Wajar (1%), 31 opini Tidak Memberikan Pendapat (5%), 194 opini Wajar Dengan Pengecualian (36%) dan 313 opini Wajar Tanpa Pengecualian (58%). (Sumber: LHP BPK Tahun 2016 Semester II).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang digunakan saat ini adalah kas to akrual. Standar ini dijadikan pedoman oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tentunya SAP ini juga berimbas pada kinerja pemerintah daerah yang harus meningkat

juga. Karena kinerja pemerintah yang baik tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 119 Pemerintah Daerah se - Jawa. Dari seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah daerah untuk dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

1. Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember tahun 2015
2. Memiliki data yang konsisten dan lengkap terkait Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Laporan Keuangan.
3. Data Pemeringkatan Daerah dipublikasikan pada website www.kemendagri.go.id
4. Memiliki data Sistem Pengendalian Intern yang lengkap pada tahun 2015.

Berdasarkan kriteria diatas, didapatkan 108 sampel dari 119 populasi yang memenuhi kriteria tersebut.

2.2 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel

a. Variabel Depend

Akuntabilitas laporan keuangan diukur berdasarkan status opini yang diperoleh dari BPK terhadap Pemerintah Daerah. Adapun untuk pengukurannya adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dengan skala 1, Tidak Wajar (TW) diukur dengan skala 2, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan skala 3, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP) diukur dengan skala 4, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diukur dengan skala 5.

b. Variabel Independen

Sistem Pengendalian Intern diukur berdasarkan jumlah temuan yang telah disampaikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran variabel ini berdasarkan jumlah temuan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa.

c. Variabel Intervening

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Data Pemeringkatan Daerah diperoleh dari publikasi pada website (www.kemendagri.go.id). Pengukuran variabel ini berdasarkan kategori dari data pemeringkatan pemerintah daerah yaitu Sangat Tinggi memiliki nilai 5, Tinggi memiliki nilai 4, Sedang memiliki nilai 3, Rendah memiliki nilai 2 dan Sangat Rendah memiliki nilai 1.

2.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Method*). Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$Y_{KPD} = b_0 + b_{SPI}X_{SPI} + e_1 \dots \dots \dots \text{Persamaan regresi 1}$$

$$Y_{ALK} = b_0 + b_{SPI}X_{SPI} + b_{KPD}X_{KPD} + e_2 \dots \dots \dots \text{Persamaan regresi 2}$$

Keterangan:

Y_{KPD} = Kinerja Pemerintah Daerah

Y_{SPI} = Sistem Pengendalian Intern

Y_{ALK} = Akuntabilitas Laporan Keuangan

b_{SPI} = *Intercept* Sistem Pengendalian Intern

b_{KPD} = *Intercept* Kinerja Pemerintah Daerah

b_{ALK} = *Intercept* Akuntabilitas Laporan Keuangan

e_1 = Residuan Kinerja Pemerintah Daerah

e_2 = Residual Akuntabilitas Laporan Keuangan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Maka, dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan adalah model Central Limit Theorem (CLT). Central Limit Theorem adalah sebuah teorema yang menyatakan apabila sampel yang diuji (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) maka distribusi sampel tersebut dianggap mengikuti distribusi normal. Sehingga berdasarkan sampel penelitian sebesar 108, maka sampel tersebut dianggap memiliki distribusi normal karena jumlahnya melebihi 30 sampel (Lind, 2014-301).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji terjadi atau tidaknya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas diperoleh bahwa nilai tolerance dari seluruh variabel menunjukkan lebih dari 0,10 atau 10% serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga semua variabel-variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji White yaitu dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai c^2 hitung (3,672) > c^2 tabel (3,8414) . Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

a. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun hasil pengujian nilai t dari variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memiliki hasil yang berpengaruh negatif signifikan, dengan sign 0,014 < (0,05) berarti bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang berarti semakin baik Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dengan sedikitnya temuan maka semakin baik juga Kinerja Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Kaltsum dan Rohman (2013) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan

Keuangan

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Kinerja Pemerintah Daerah mempunyai thitung sebesar 2,122 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Oleh Karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh dan secara signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan, yang berarti semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas

pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. Temuan ini konsisten dengan literatur sebelumnya yang menemukan bahwa kinerja akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah (Lin, 2010; Mandell, 2007).

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Fontanelle dan Rossieta (2014), menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif dengan akuntabilitas laporan keuangan, sehingga semakin baik opini kinerja yang diberikan maka semakin tinggi kemungkinannya daerah tersebut memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi.

c. Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Laporan

Keuangan

Pengujian atas variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan memiliki hasil yang berpengaruh negatif signifikan, dengan sign $0,042 < (0,05)$ sehingga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan, yang berarti semakin sedikit temuan SPI yang didapat maka Akuntabilitas Laporan Keuangan semakin baik. Berdasarkan data yang diolah Pemerintah Kabupaten/Kota telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh UU no 60 tahun 2008. Hal ini sesuai dengan penelitian Purbasari dan Bawono (2017) menghasilkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

d. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Intervening.

Pengaruh koefisien langsung dapat dilihat dari koefisien beta masing-masing model regresi. Pengaruh langsung Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar -0,196. Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat dihitung dari Koefisien Beta SPI terhadap KPD x Koefisien Beta KPD terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan yaitu sebesar $-0,236 \times 0,202 = -0,0476$.

Oleh karena itu pengaruh tidak langsung sebesar -0,0476 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar -0,196. Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Kinerja pemerintah Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan melalui Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel *Intervening*.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel hanya pada Pulau Jawa, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada tempat yang dijadikan objek penelitian. (2) Riset dilakukan hanya menggunakan data sekunder Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala - kendala dalam pencapaian kinerja yang baik.

4.3 Saran

Atas dasar kesimpulan serta keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili daerah secara simultan. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya melakukan konfirmasi langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se - jawa.
- Ida, Ayu Enny Kiranayanti. Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal. Universitas Udayana. Bali.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Netty, Herawati. 2011. "Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi". E-jurnal. Volume 13 no. 2. Universitas Jambi.
- Neco Fransiska, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2016. Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. E-jurnal. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta.

- Nikma, Ragil Anggraini. 2017. "Pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas pemerintahan dengan pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi". E-Jurnal. STIESIA. Surabaya.
- Nur, Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- <http://www.kemendagri.go.id/>
- <http://www.bpk.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan APBD.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purbasari dan Bawono. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Jurnal Reaksi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ummu, Kaltsum Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). E-jurnal. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Undang-Undang Dasar 1945. No 15 Tahun 2006. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Fontanella, Amy dan Hilda Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. SNA 17 Mataram. Lombok.
- Bawono, A. D. B. (2015). *The role of performance based budgeting in the Indonesian public sector* (Doctoral dissertation, Department of Accounting and Corporate Governance, Faculty of Business and Economics, Macquarie University).